



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM



**RENSTRA DISKOMINFO
KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025-2029**

Visi:

Terwujudnya pelayanan Komunikasi dan Informasi yang Efektif dan Akuntabel Menuju Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera

Kata Pengantar

Kita telah sepakat menyatukan visi, misi, nilai-nilai luhur dan tujuan bersama dalam suatu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selalu siap dan mampu menghadapi berbagai bentuk perubahan baik yang datang dari dalam maupun yang berasal dari luar lingkungannya. Untuk itu agar visi, misi dan tujuan organisasi dapat dicapai maka diperlukan suatu pola manajemen yang terarah dan terkonsep dengan baik, agar proses pembuatan kebijakan memenuhi kriteria dan harapan yang ditentukan.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya mendefinisikan tujuan organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Sesuai dengan tugas pokok yakni melaksanakan kewenangan otonomi di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi maka telah difokuskan seluruh aktifitasnya pada layanan prima dalam rangka mewujudkan *good governance*. Seluruh unsur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah bertekad bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

Perencanaan strategis ini disusun sebagai implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Agam Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045. Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja, rencana kinerja, pelaksanaan tugas pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Strategis ini juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan yang akan terjadi di masa depan.

Lubuk Basung, Mei 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Agam



ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP, M.Sc
Pembina Tk. I (IV. B)
NIP. 19820807 200112 2 002

Daftar Isi

Halaman	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	6
Perangkat Daerah.....	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumber daya PD	18
2.3. Kinerja Pelayanan PD	19
2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi...	30
2.5. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Agam	32
2.6. Telaahan Renstra Kementrian dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	37
2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	39
2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	45
BABIV Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	69
BAB V Penutup	71

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor: 456 TAHUN 2020 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Rencana Strategik atau renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas perangkat daerah disusun berdasarkan RPJM dan bersifat indikatif, yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas Kominikasi dan Informatika menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Dinas Kominfo yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kominfo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Seiring dengan

terjadinya perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal, maka perlu disusun strategi yang dapat memberikan fokus yang jelas terhadap isu-isu strategis yang akan dihadapi serta memberikan antisipasi yang cukup memadai terhadap perubahan-perubahan strategis lain yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu siap dan mampu menghadapi berbagai bentuk perubahan baik yang datang dari dalam maupun yang berasal dari luar lingkungannya. Untuk itu agar fungsi dan tujuan organisasi dapat tercapai maka diperlukan suatu pola manajemen yang terarah dan terkonsep dengan baik, agar proses pembuatan kebijakan memenuhi kriteria dan harapan yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (saat ini dikenal dengan OPD) dalam menyusun rancangan Rencana Strategis, merujuk pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, oleh karena itu tujuan dan sasaran dalam dokumen renstra adalah implementasi dari upaya pencapaian sasaran daerah sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Rangkaian aktifitas tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan merupakan suatu yang sangat menentukan bagi suatu keberhasilan organisasi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam disusun berdasarkan tahapan-tahapan. Tahapan persiapan dengan membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Kelompok kerja. Kemudian dilaksanakan orientasi mengenai Renstra kepada seluruh anggota tim, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra OPD, dan menganalisis serta

menginterpretasikan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra. Selanjutnya

dilaksanakan pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan yang disusun. Untuk itu diperlukan data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta terdapat keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Dinas Kominfo Propinsi, Renstra Kementerian Kominfo dan Renja Dinas Kominfo.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, dan perumusan rancangan akhir serta penetapan peraturan Kepala OPD tentang Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.

Dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, digunakan teknik analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam dan nilai-nilai yang dianut para pelaksana, dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam serta dengan memperhatikan harapan masyarakat luas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam 2025-2029

I.2 Landasan Hukum

Berikut ini beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
10. Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan No 102 Tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2045

I.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dalam penyusunannya melibatkan unsur internal baik pegawai maupun jajaran pimpinan, serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Penyusunan renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan, sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Periode 2025-2029.

I.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 disusun dalam koridor RPJMD Kabupaten Agam 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi. Diharapkan dengan adanya Renstra ini pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa lebih dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Secara garis besar penyusunan renstra tetap memperhatikan RPJMD Kabupaten Agam. Renstra disusun diawali dengan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah. Tahap akhir dari proses adalah implementasinya dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, oleh karena itu tujuan dan sasaran dalam dokumen renstra adalah implementasi dari upaya pencapaian sasaran daerah sesuai tugas pokok dan Fungsi OPD.

Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
- Bab II : Menjelaskan tentang Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. Serta Menjelaskan tentang permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD, , Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu Strategis.

Bab III : Menjelaskan tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Serta Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.

Bab IV : Menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan, sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan.

Bab V : Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dapat diuraikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Kominfo Kabupaten Agam. Dinas Kominfo mempunyai 3 Urusan Pelayanan dasar yaitu, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik Sektoral.

Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Agam melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan adminstrasi Dinas; dan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Diskominfo Kabupaten Agam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan dalam bagan serta penjelasannya sebagai berikut:

A. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

B. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan; dan Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian yang terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- 3) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- 4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- 6) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- 7) Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- 8) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 9) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- 10) Melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 11) Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- 12) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian Perencanaan dan Pelaporan;
- 13) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- 14) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- 15) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- 16) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- 17) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistic;
- 18) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 19) Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- 20) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

Dalam melaksanakan tugas Sub Subtansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik daerah. Uraian Tugas dari Subtansi Keuangan adalah;

- 1) Melakukan Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- 2) Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- 3) Melakukan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah membayar;

- 4) Melakukan urusan gaji pegawai;
- 5) Menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- 6) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- 7) Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 8) Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- 9) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- 10) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan;

C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasindaerah.

Pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu:

- 1) Kelompok JF Sub Subtansi Pengelolaan dan Aspirasi Publik
Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan dan aspirasi publik di Daerah
- 2) Kelompok JF Sub subtansi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan

Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Daerah.

3) Kelompok JF Sub substansi Sumber Daya Komunikasi Publik

Kelompok Jabatan Sub substansi Sumberdaya Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional maupun pemerintah Daerah dan pelayanan informasi publik di Daerah.

D. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan, layanan keamanan informasi dan persandian, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Daerah, dan layanan statistik sektoral :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknik Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan, layanan keamanan informasi dan persandian, statistik sektoral, dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Daerah;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknik Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data, layanan keamanan informasi dan persandian, statistik sektoral, dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Daerah;

- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, d. e. dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknik Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan, layanan keamanan informasi dan persandian, statistik sektoral, dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Daerah;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi SPBE, layanan keamanan informasi dan persandian, statistim sektoral, dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu:

- a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi menyelenggarakan:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi infrastruktur teknologi informasi;
- 2) Melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- 3) Melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- 4) Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- 5) Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- 6) Melaksanakan layanan peningkatan kapastas aparatur dan sertifikasi teknik bidang TIK;
- 7) Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra pemerintah daerah, dan;

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

b) Seksi Statistik Sektoral

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Statistik Sektoral menyelenggarakan:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral;
- 2) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik sektoral;
- 3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 4) melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi statistik sektoral;
- 5) melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi statistik sektoral;
- 6) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral guna mewujudkan tata kelola statistik sektoral yang baik;
- 7) menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan penyusunan standardisasi data/informasi statistik sektoral;
- 8) menyelenggarakan kegiatan dalam forum satu data;
- 9) menyelenggarakan kegiatan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- 10) menyelenggarakan kegiatan walidata;
- 11) melaksanakan pemeriksaan data prioritas yang dihasilkan produsen data dengan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia;
- 12) melaksanakan penyebarluasan data melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 13) melaksanakan pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia setelah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 14) melaksanakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survey data statistik sektoral;
- 15) membina dan mengawasi pengelolaan data statistik sektoral;
- 16) melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- 17) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

c) Seksi Persandian

- 1) Seksi Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kabupaten, serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi:
- 2) Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
- 4) Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- 5) Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- 6) Melaksanakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah,
- 7) Melaksanakan pelaksanaan audit TIK,
- 8) Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,
- 9) Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah,

- 10) Melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.
- 11) Menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- 12) Menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan daerah;
- 13) Menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- 14) Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- 15) Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- 16) Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- 17) Mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- 18) Mengirim, menyimpan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- 19) Menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- 20) Mengadakan, menyimpan, mendistribusikan dan memusnahkan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- 21) Memelihara dan memperbaiki perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

- 22) Menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan daerah;
- 23) Menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- 24) Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- 25) Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
- 26) Melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
- 27) Mengelola *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- 28) Melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- 29) Menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- 30) Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 31) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman, dan
- 32) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

E. Bidang Layanan e-Government

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem Teknik Informasi dan Komunikasi Smart Regency, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Daerah, layanan manajemen data, informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengembangan Sumber Daya Teknik Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintahan daerah dan Masyarakat di daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart regency, layanan nama *domain* dan *sub domain* bagi lembaga, pelayanan publik, integrasi layanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,

spesifik & suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, integrasi layanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di pemerintah daerah pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan ekosistem TIK smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, integrasi layanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Layanan *e-Government* mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pengembangan Aplikasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi di Daerah:

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Tata Kelola dan Ekosistem E-government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem Teknik Informasi dan Komunikasi smart regency, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Integrasi Sitem Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi integrasi sistem informasi layanan publik dan pemerintahan di daerah.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

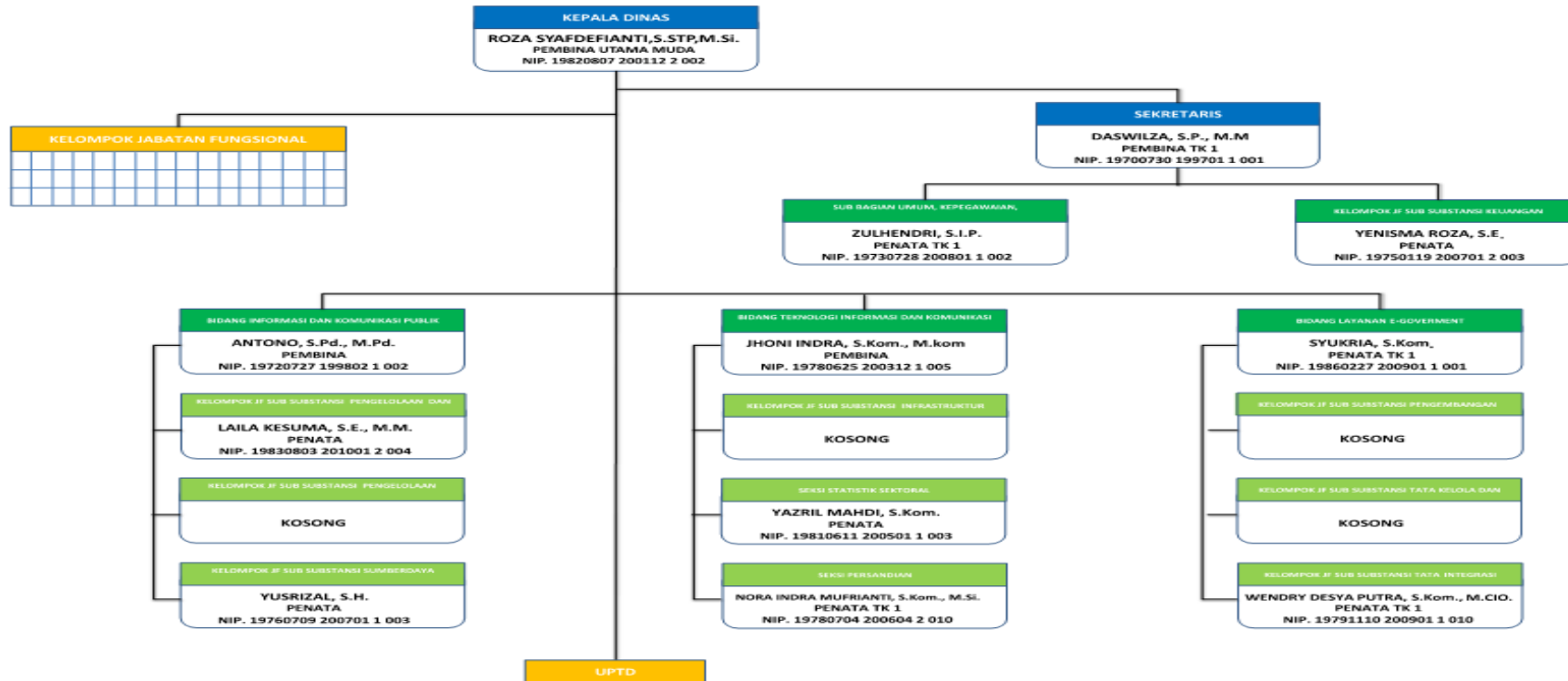
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebahagian tugas Diskominfo sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsionalnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kominfo



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM**

Jl. Soekarno Hatta No. 11 PADANG BARU LUBUK BASUNG



2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam pada Tahun 2025 berjumlah sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut : (hitung Kembali, karena tidak sama pada jumlah kedua tabel ini)

Tabel 2.1

Status dan Strata Pendidikan Pegawai

NO	Status	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PNS	5	3	8	2	2	-	-	-	-	-	16	4
2	P3K	-	-	9	3	1	2	2	-	-	-	12	5
3	Tenaga Kontrak/Ahli	-	-	6	2	-	1	1	1	-	-	8	3
4	Tenaga Harian Lepas			1	1			3	1			4	2
	Jumlah	5	3	22	8	3	3	6	1	-		40	14

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Jenjang Pendidikan Terakhir				Status Kepegawaian		Bidang Ilmu				
		PNS*	P3K	Kontrak/Ahli	THL**	Jumlah	Pemerintahan /Administrasi	Komunikasi	Komputer	Teknik Mesin /informatika	Lainnya
1.	Magister (S-2)	8	-		-	8				-	8
2.	Sarjana (S-1)	10	12	8	2	32		2	14		15
3.	Diploma-III	2	3	1	-	6	-		4	-	2
4.	SLTA	-	2	2	4	8	-	-	-	-	8
5.	SMP	-			-		-	-	-	-	-
	Jumlah	20	17	11	6	54	-	2	18		34

Dalam pelaksanaannya tenaga ahli difungsikan untuk mendukung kinerja Kominfo umumnya pemerintah Kabupaten agam untuk

membantu implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan uraian tugas sbb:

1. Programmer

Tugas Programmer dapat dibagi sebagai analisis perangkat lunak, data base, desain aplikasi, coding dan hal lainnya yang berhubungan dengan perangkat lunak

2. Infrastruktur TIK

Dalam pelaksanaannya tenaga ahli infrastruktur TIK di fungsikan untuk perancangan, pengembangan, troubleshooting keamanan infrastruktur TIK dan hal lainnya yang berhubungan dengan Infrastruktur TIK

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam secara garis besar melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih (*good and clean governance*) dan profesional melalui *electronic government (e-government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK.

Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan urusan komunikasi dan informatika antara lain sebagai berikut:

- a. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan faktor pendukung utama dalam tercapainya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat serta penerapan aplikasi pengolahan data dengan teknologi *software* saat ini. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer-komputer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam menggunakan teknologi LAN dan WLAN. Jaringan dengan LAN hanya menggunakan kabel untuk menghubungkan antar komputer sedangkan WLAN tanpa menggunakan kabel untuk berkomunikasi.

Sampai dengan tahun 2025, berbagai infrastruktur jaringan komputer telah terpasang sebagai berikut:

Tabel 2.3
SKPD Yang Terpasang Jaringan Intranet dan Internet di
Kabupaten Agam

No.	SKPD	Koneksi Intranet	Koneksi Internet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sekretariat Daerah	LAN, WLAN	Ada
2	Sekretariat DPRD	FO, LAN, WLAN	Ada
	Inspektorat	FO, LAN, WLAN	Ada
3	Badan Keuangan Daerah	FO, LAN, WLAN	Ada
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	FO, LAN, WLAN	Ada
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	FO, LAN, WLAN	Ada
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	FO, LAN, WLAN	Ada
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	LAN, WLAN	Ada
8	Dinas Perindag Koperasi, UKM	LAN, WLAN	Ada
9	Dinas Kesehatan	FO, LAN, WLAN	Ada
10	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	LAN, WLAN	Ada
11	Dinas Pertanian	LAN, WLAN	Ada
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	FO, LAN, WLAN	Ada
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	LAN, WLAN	Ada
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	LAN, WLAN	Ada
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	FO, LAN, WLAN	Ada
16	Dinas Perhubungan	FO, LAN, WLAN	Ada
17	Dinas Pendidikan	LAN, WLAN	Ada
18	Dinas Sosial	FO, LAN, WLAN	Ada
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	FO, LAN, WLAN	Ada
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	LAN, WLAN	Ada
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	LAN, WLAN	Ada
22	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Seni dan Budaya	LAN, WLAN	Ada
23	Dinas Pemukiman Umum dan Perumahan Rakyat	LAN, WLAN	Ada
24	Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak	WLAN	Ada
25	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	FO, LAN, WLAN	Ada
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	WLAN	Ada
27	Rumah Sakit Umum Daerah	FO, WLAN	Ada
28	Kecamatan Baso	METRO	Ada
29	Kecamatan IV Angkek	METRO	Ada
30	Kecamatan Candung	METRO	Ada
31	Kecamatan Tilatang Kamang	METRO	Ada
32	Kecamatan Kamang Magek	METRO	Ada
33	Kecamatan Banuhampu	METRO	Ada
34	Kecamatan Sei Puar	METRO	Ada
35	Kecamatan Matur	METRO	Ada
36	Kecamatan Tanjung Raya	METRO	Ada
37	Kecamatan Lubuk Basung	METRO	Ada

38	Kecamatan Tj Mutiara	METRO	Ada
39	Kecamatan Malalak	METRO	Ada
40	Kecamatan Palembang	METRO	Ada
41	Kecamatan Palupuh	METRO	Ada
42	Kecamatan IV Nagari	METRO, LAN	Ada
43	Kecamatan IV Koto	METRO	Ada

- Keterangan : LAN : jaringan dengan kabel.
WLAN : jaringan tanpa kabel (menggunakan radio dan antena).
VPN : Jaringan virtual menggunakan jasa pihak ketiga.
METRO : Jaringan Khusus yang disewa dari ISP

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 39 SKPD telah tersedia Infrastruktur Jaringan Intranet TIK dan 39 SKPD telah tersedia koneksi Internet, sedangkan 3 SKPD Kecamatan belum terjangkau oleh infrastruktur koneksi Jaringan Intranet Pemerintah Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan kondisi dan lokasi yang saat ini sulit untuk dijangkau dan membutuhkan biaya investasi yang lebih besar untuk membangunnya. Sedangkan untuk akses internet, hanya 3 SKPD Kecamatan yang belum tersedia akses internet. Namun untuk koneksi jaringan internal Pemerintah Kabupaten Agam di kantor-kantor walinagari untuk saat ini belum terhubung. Sedangkan untuk akses internet di masing-masing kantor nagari lebih kurang sebanyak 40% sudah terakses.

Infrastruktur yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2004 sampai tahun 2021 tersebut di atas telah beroperasi secara maksimal. Berbagai kendala teknis dan non teknis dapat dihadapi dengan baik sehingga sampai saat ini jaringan masih aktif. Dengan tetap aktifnya jaringan komputer di Pemerintah Kabupaten Agam telah dimanfaatkan oleh berbagai OPD yang telah terhubung.

b. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Agam

Situs web pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *e-government*. Pembuatan situs *web* pemda mempunyai sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemda dengan menggunakan media internet. Penerapan dan penggunaan situs *web* pemda akan selalu berhubungan satu sama

lainnya dengan instansi-instansi internal pada pemda. Instansi-instansi internal pada pemda harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki situs web dengan nama *domain* www.agamkab.go.id, yang telah *on-line* sejak tahun 2003. Saat ini situs *web* Pemerintah Kabupaten Agam telah memberikan berbagai informasi pada konten-kontennya antara lain:

- 1) Gambaran umum tentang profil daerah, prestasi, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Visi-Misi Kabupaten Agam, struktur organisasi, anggaran, kebijakan daerah, dan pelayanan.
- 3) Transparansi pengelolaan anggaran daerah,
- 4) Transparansi perencanaan pembangunan daerah
- 5) Informasi lainnya seperti: berita, info lelang, agenda Bupati, galeri foto, karya tulis, email dan lain sebagainya.

Sejalan dengan perkembangannya dalam rangka mempercepat pemberian informasi oleh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam, beberapa OPD telah menyediakan situs *web* dan sub *domain* untuk OPD-nya masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.4

Daftar Sub Domain Website OPD di Kabupaten Agam

No.	Domain / Sub Domain	Pemilik/Pengelola
1	agamkab.go.id	Pemerintah Kab. Agam/ Dishubkominfo
2	setwan.agamkab.go.id	Sekretariat DPRD
3	Sekda.agamkab.go.id	Sekretariat Daerah
4	inspektorat.agamkab.go.id	Inspektorat
5	bappeda.agamkab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	bkd.agamkab.go.id	Badan Keuangan Daerah
7	bkpsdm.agamkab.go.id	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	kesbangpol.agamkab.go.id	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	bpbd.agamkab.go.id	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	dukcapil.agamkab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	perhubungan.agamkab.go.id	Dinas Perhubungan

12	Perindagkukm.agamkab.go.id	Dinas Perindag Koperasi, UKM
13	dpkp.agamkab.go.id	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
14	pertanian.agamkab.go.id	Dinas Pertanian
15	diskominfo.agamkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	dinkes.agamkab.go.id	Dinas Kesehatan
17	disdikbud.agamkab.go.id	Dinas Pendidikan dan Seni dan Budaya
18	disparpora.agamkab.go.id	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
19	dpmptspnaker.agamkab.go.id	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
20	perkim.agamkab.go.id	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21	daldukkbpppa.agamkab.go.id	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	disarpus.agamkab.go.id	Dinas Arsip dan Perpustakaan
23	putr.agamkab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	Dpmn.agamkab.go.id	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
25	Lhk.agamkab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
26	Satpolppdamkar.agamkab.go.id	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	rsud.agamkab.go.id	Rumah Sakit Umum Daerah
28	Tanjungmutiara.agamkab.go.id	Kecamatan Tanjung Mutiara
29	lubukbasung.agamkab.go.id	Kecamatan Lubuk Basung
30	ampeknagari.agamkab.go.id	Kecamatan Ampek Nagari
31	Tanjungraya.agamkab.go.id	Kecamatan Tanjung Raya
32	palembayan.agamkab.go.id	Kecamatan Palembang
33	matur.agamkab.go.id	Kecamatan Matur
34	ivkoto.agamkab.go.id	Kecamatan IV Koto
35	malalak.agamkab.go.id	Kecamatan Malalak
36	banuhampu.agamkab.go.id	Kecamatan Banuhampu
37	sungaipua.agamkab.go.id	Kecamatan Sungaipua
38	tilatangkamang.agamkab.go.id	Kecamatan Tilatang Kamang
39	baso.agamkab.go.id	Kecamatan Baso
40	palupuh.agamkab.go.id	Kecamatan Palupuh
41	ampekangkek.agamkab.go.id	Kecamatan Ampek Angkek
42	canduang.agamkab.go.id	Kecamatan Canduang
43	kamangmagek.agamkab.go.id	Kecamatan Kamang Magek
44	adpem.agamkab.go.id	Bagian Administrasi Pembangunan
45	humas.agamkab.go.id	Bagian Hubungan Masyarakat
46	hukum.agamkab.go.id	Bagian Hukum
47	infrastruktur.agamkab.go.id	Bagian Infrastruktur
48	kesra.agamkab.go.id	Bagian Kesejahteraan Rakyat

49	organisasi.agamkab.go.id	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
50	pemotoda.agamkab.go.id	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
51	bpbj.agamkab.go.id	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
52	perekosda.agamkab.go.id	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
53	umum.agamkab.go.id	Bagian Umum

c. Aplikasi Khusus

Disamping media informasi dan komunikasi secara *on-line* melalui internet, Pemerintah Kabupaten Agam juga telah menggunakan beberapa aplikasi dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat maupun mempercepat pelaksanaan pekerjaan secara internal. Adapun aplikasi yang telah dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD),
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),
3. Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE):
lpse.agamkab.go.id,
4. Aplikasi e-KTP / Benroller (AFIS),
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
6. Aplikasi Pendataan Pendidikan: dapodikagam.net
7. Aplikasi Gaji
8. Aplikasi PBB
9. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
10. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG),
simpeg.agamkab.go.id
11. Sistem Informasi e-Audit
12. Aplikasi Cetak Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
13. Sistem Pelayanan Satu Pintu (SiCantik): ptsp.agamkab.go.id
14. Aplikasi Gizi
15. Aplikasi Imunisasi
16. SIRS
17. PCARE
18. E-Planing
19. SIKARAMBA
20. E-Kliping
21. SINGERTI

22. SIKAP
23. E-Planing
24. Kecamatan Lubuk Basung
25. Kecamatan Tanjung Raya
26. E-Surek
27. Aplikasi Pelayanan Kependudukan dan Capil

d. Berbagi Koneksi Internet

OPD yang telah terhubung jaringan komputer dapat menggunakan internet sebagai media informasi dan komunikasi serta memperoleh ilmu pengetahuan yang positif dari seluruh penjuru dunia. Untuk mengantisipasi hal-hal negatif terhadap penggunaan internet di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Agam, dilakukan pengamanan dan pengaturan terhadap situs web - situs web yang menimbulkan dampak negatif tersebut.

e. Berbagi atau tukar menukar data

Dengan manfaatnya antara lain tukar-menukar data dapat dilakukan secara cepat, dapat saling berbagi informasi, pemakaian file data dengan komputer lain, memudahkan dalam menggunakan perangkat hardware secara bersama-sama misalkan printer serta efisiensi kerja menjadi meningkat.

f. Akses Internet untuk Masyarakat

Kebutuhan internet bagi masyarakat sudah merupakan kebutuhan yang harus tersedia setiap saat dan dimana saja. Manfaat internet tersebut sudah sangat dirasakan oleh masyarakat luas mulai dari mendapatkan informasi sampai meningkatkan ekonomi masyarakat

Pada masa Pandemi covid 19 kebutuhan internet semakin meningkat apalagi untuk dunia pendidikan, dimana sistem pembelajaran yang tatap muka tidak dibolehkan dan beralih ke sistem pembelajaran daring.

Untuk itu dinas kominfo telah membangun Wifi Publik gratis bagi masyarakat di lokasi sebagai berikut:

Tabel 2.5 lokasi Wifi publik

No	Lokasi	Layanan
1	Kantor Dinas Kominfo	Wifi Publik
2	Gor Agam	Wifi Publik
3	Linggai	Wifi Publik
4	Pasar Terminal Lubuk Basung	

g. Layanan Telekomunikasi

Mengingat pertumbuhan penduduk sinergis dengan kebutuhannya yang semakin meningkat, mengakibatkan kebutuhan di telekomunikasi juga semakin meningkat. Alat komunikasi bukan dianggap sebagai barang mewah lagi namun sudah merupakan alat pemenuhan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Sarana telekomunikasi merupakan alat komunikasi yang akan “memperpendek jarak” dan mempermudah kedua belah pihak tersebut dalam melakukan suatu aktifitas dan atau kegiatan.

Keberadaan sarana (menara) telekomunikasi tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Agam dan manfaat sangat dirasakan bagi masyarakat. Disamping itu perkembangan pembangunan menara telekomunikasi juga sudah semakin menjamur dan kurang terkendali yang menyebabkan terjadinya hutan besi atau menara di suatu daerah, tentunya akan membuat kurangnya keindahan lingkungan, serta rawan gangguan lingkungan. Berdasarkan pendataan menara telekomunikasi di Kabupaten Agam tahun 2023 berjumlah lebih kurang 210 buah yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Tanjung Mutiara	13
2	Lubuk Basung (ibukota kabupaten)	27
3	Ampek Nagari	10
4	Tanjung Raya	16
5	Matur	13
6	IV Koto	12

7	Malalak	2
8	Banuhampu	17
9	Sungai Pua	6
10	Ampek Angkek	20
11	Canduang	10
12	Baso	18
13	Tilatang Kamang	19
14	Kamang Magek	7
15	Palembayan	9
16	Palupuh	11
	Jumlah	210

Berdasarkan hasil survey masih banyak daerah di Kabupaten Agam yang *blankspoot area*. Untuk itu melalui program PASTI BAKTI telah diusulkan pembangunan menara seluler sebagai berikut:

Tabel 2.7

Usulan pembangunan menara seluler

No	Usulan Laokasi pembangunan	Status
1	Kampung Tabu Nagari Sipinang Kec. Palembayan	Sudah diusulkan
2	Jorong Lurah Dalam Nagari Pasia Laweh Kec. Palupuh	Sudah diusulkan
3	Silungkang Kec. Palembayan	Sudah diusulkan
4	Jorong Sungai Guntuang Nagari Pasio Laweh Kec. Palupuh	Sudah diusulkan
5	Jorong Tandikek Nagari Sitalang	Sudah diusulkan

h. Layanan Data Center Pemerintah Daerah Agam:

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah telah dibangun beberapa aplikasi. Aplikasi-aplikasi tersebut membutuhkan ruangan dengan standar tertentu. Dinas Kominfo telah membangun satu buah ruangan data center yang dapat menampung aplikasi-aplikasi lokal.

2.4 Sumber Daya Aset/Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam menempati satu bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 11, Padang Baru, Lubuk Basung dengan status lahan, gedung dan ruangan adalah berstatus sewa dan 2 (dua) ruangan yang terletak di gedung Kantor Bupati Agam Jalan Sudirman No.1 Lubuk Basung. Lahan, gedung dan

ruangan ini adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Agam. Peruntukan atau penggunaan gedung dan ruangan ini dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.8
Peruntukan/Penggunaan Bangunan

No	Peruntukan	Jumlah (Unit)	Luas (m ²)
A	Gedung Kantor Dinas Kominfo		
1	Ruang Kerja Kepala Dinas	1	20
2	Ruang Kerja Sekretaris Dinas	1	10
3	Ruang Kasubag, Kasi dan Staf	1	61
4	Ruang Kerja Kabid IKP	1	6
5	Ruang Kabid TIK	1	8
6	Ruang Kabid e-Gov	1	6
7	Ruang Bendahara dan Staf	1	6
8	Ruang Tamu	1	16
9	Musholla	1	3
10	Gudang	1	2
11	Toilet	2	3
B	Gedung Kantor Bupati		
1	Ruang Data Center	1	16
2	Ruang NOC	1	9
	Jumlah Total	14	

Tabel 2.9
Aset Fasilitas Diskominfo

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	3	2	1	0	
2	Kendaraan roda 2	2	2	0	0	
3	Mesin ketik	1	1	0	0	
4	Rak besi	4	4	0	0	
5	Filling Kbinet	2	2	0	0	
6	CCTV	2	1	1	0	
7	Papan Visual/Papan Nama	0	0	0	0	
8	Mesin absensi	3	1	0	2	
9	Infokus	2	1	0	1	
10	Layar LCD projector	1	1	0	0	
11	UPS	1	1	0	0	
12	stabilizer	1	1	0	0	
13	meja kerja	45	45	0	0	
14	kursi kerja	64	54	0	10	
15	A.C split	11	5	0	6	
16	Televisi	2	2	0	0	
17	Sound System	2	2	0	0	
18	Tangga Aluminium	1	1	0	0	
19	Gordyin/Kray	2	2	0	0	
20	Lampu Hias	2	2	0	0	
21	Camera Digital	4	1	2	1	
22	Tabung Pemadam Kebakaran	3	3	0	0	
23	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	8	8	0	0	
24	camera conference	2	2	0	0	
25	Video Processor	1	0	0	1	
26	Handy Talky (HT)	5	5	0	0	
27	Radio Rig	1	1	0	0	
28	P.C Unit	8	6	0	2	
29	P.C Unit (e-voting)	54	54	0	0	
30	Lap top	41	37	4	0	
31	Card reader	76	76	0	0	
32	Monitor	4	2	0	2	
33	Printer	8	4	0	4	
34	Printer thermal	54	54	0	0	
35	Scanner	3	1	0	2	
36	Hardisk External	1	1	0	0	
37	Server	6	6	0	0	
38	Rak Server	2	2	0	0	
39	Rackmount	3	3	0	0	
40	Router	72	70	0	2	Luar ruangan
41	Penguat sinyal LTE	1	1	0	0	
42	Access point	97	97	0	0	Luar ruangan
43	Switch	51	51	0	0	Luar ruangan
44	Antena Grid	2	2	0	0	Luar ruangan
45	Antena Solid	7	7	0	0	Luar ruangan
46	Fution Splicer	1	1	0	0	
47	Clever Optical	1	1	0	0	
48	Opm	1	1	0	0	
49	Laser Tester	1	1	0	0	
50	Wallmount FO 2 Disk	13	13	0	0	Luar ruangan
51	OTB 48 Core SC	2	2	0	0	
52	Pole 7 m	17	17	0	0	Luar ruangan
53	Module SFP	62	62	0	0	
54	Pole 9 m	7	7	0	0	
55	Antena Sektoral	10	10	0	0	Luar ruangan
56	Inverter	1	1	0	0	
57	OTDR (Optical Time Domain Reflectom	1	1	0	0	
58	Converter FO	30	30	0	0	
59	Vidiotron	1	0	0	1	Luar ruangan
60	Media Running Text	1	0	0	1	Luar ruangan
61	Instalasi Grounding	1	1	0	0	Luar ruangan

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (IKU IKK Tahun 2021-2025)	Target NSPK (di counting apabila IKU)	Target IKK (di counting apabila IKK)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Rentra Tahun					Rasio Rentra Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase OPD yang telah menerapkan SPBE	3.476.36 3.372,00		1.969.31 6.400	1.503.4 13.715	2.023.6 77.908	1.555.4 33.456	2.058.8 58.652	1.808.5 94.556	1.460.6 14.497	1.635.6 89.854	1.292.9 28.480	476.932 .442	1.969.3 16.300, 00	2.041.8 18.170, 00	2.041.8 18.170, 00	2.041.8 18.170, 00	2.041.8 18.170, 00
-	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.476.36 3.372,00		1.969.31 6.400	1.503.4 13.715	2.023.6 77.908	1.555.4 33.456	2.058.8 58.652, 00	1.808.5 94.556	1.460.6 14.497	1.635.6 89.854	1.292.9 28.480	476.932 .442	1.969.3 16.300	2.041.8 18.170	2.041.8 18.170	2.041.8 18.170	2.041.8 18.170
2	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	105.990. 000,00		102.744. 500	78.400. 000	102.451 .000	136.998 .820	65.721. 400	97.461. 120	76.369. 605	92.033. 400	50.289. 070	29.825. 000	102.744 .400	78.399. 900	102.450 .900	136.998 .720	65.721. 300
-	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	105.990. 000,00		102.744. 500	78.400. 000	102.451 .000	136.998 .820	65.721. 400,00	97.461. 120	76.369. 605	92.033. 400	50.289. 070	29.825. 000	102.744 .400	78.399. 900	102.450 .900	136.998 .720	65.721. 300

3	Peringkat keterbukaan informasi badan publik	1.660.06 3.711,00		2.041.81 8.270	1.660.6 68.667	1.221.5 88.352	1.314.8 44.338	1.880.8 34.978	1.918.9 05.720	1.431.0 69.957	1.180.5 90.035	901.486 .624	175.567 .115	2.041.8 18.170	1.660.6 68.567	1.221.5 88.252	1.314.8 44.238	1.880.8 34.878
	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.660.06 3.711,00		2.041.81 8.270	1.660.6 68.667	1.221.5 88.352	1.314.8 44.338	1.880.8 34.978,00	1.918.9 05.720	1.431.0 69.957	1.180.5 90.035	901.486 .624	175.567 .115	2.041.8 18.170	1.660.6 68.567	1.221.5 88.252	1.314.8 44.238	1.880.8 34.878
4	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20.000.0 00,00		25.666.0 00	20.472. 500	35.042. 500	25.500. 000	6.551.0 00	22.876. 100	19.922. 250	31.741. 000	12.133. 700	3.550.6 00	25.665. 900	20.472. 400	35.042. 400	25.499. 900	6.550.9 00
	- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	20.000.0 00,00		25.666.0 00	20.472. 500	35.042. 500	25.500. 000	6.551.0 00,00	22.876. 100	19.922. 250	31.741. 000	12.133. 700	3.550.6 00	25.665. 900	20.472. 400	35.042. 400	25.499. 900	6.550.9 00
5	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	4.089.42 0.896,92	-	2.814.98 0.824,00	3.097.1 35.188, 00	2.960.2 72.426, 00	4.076.2 32.544, 00	3.807.2 46.012, 92	2.526.1 93.932, 00	2.881.9 84.566, 00	2.799.4 26.200, 00	3.864.2 55.791, 00	2.748.7 23.148, 00	2.814.9 80.724, 00	3.097.1 35.088, 00	2.960.2 72.326, 00	4.076.2 32.444, 00	3.807.2 45.912, 92
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.089.42 0.896,92		2.814.98 0.824	3.097.1 35.188	2.960.2 72.426	4.076.2 32.544	3.807.2 46.012, 92	2.526.1 93.932	2.881.9 84.566, 00	2.799.4 26.200, 00	3.864.2 55.791	2.748.7 23.148	2.814.9 80.724	3.097.1 35.088	2.960.2 72.326	4.076.2 32.444	3.807.2 45.913

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian Program	Pagu Anggaran Belanja pada tahun Ke					Realisasi Belanja pada tahun ke					Rasio Anggaran pada tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.81 4.98 0.82 4	3.09 7.13 5.18 8	2.96 0.27 2.42 6	4.07 6.23 2.54 4	3.80 7.24 6.01 3	2.52 6.19 3.93 2	2.88 1.98 4.56 6	2.79 9.42 6.20 0	3.86 4.25 5.79 1	2.74 8.72 3.14 8	2.814. 980.7 24	3.097. 135.0 88	2.960. 272.3 26	4.076. 232.4 44	3.807. 245.9 13	1, 1 1	1, 0 7	1, 0 6	1, 0 5	1, 3 9
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.04 1.81 8.27 0	1.66 0.66 8.66 7	1.22 1.58 8.35 2	1.31 4.84 4.33 8	1.88 0.83 4.97 8	1.91 8.90 5.72 0	1.43 1.06 9.95 7	1.18 0.59 0.03 5	901. 486. 624	175. 567. 115	2.041. 818.1 70	1.660. 668.5 67	1.221. 588.2 52	1.314. 844.2 38	1.880. 834.8 78	1, 0 6	1, 1 6	1, 0 3	1, 4 6	1, 0, 7 1
3	Program Aplikasi Informatika	1.96 9.31 6.40 0	1.50 3.41 3.71 5	2.02 3.67 7.90 8	1.55 5.43 3.45 6	2.05 8.85 8.65 2	1.80 8.59 4.55 6	1.46 0.61 4.49 7	1.63 5.68 9.85 4	1.29 2.92 8.48 0	476. 932. 442	1.969. 316.3 00	1.503. 413.6 15	2.023. 677.8 08	1.555. 433.3 56	2.058. 858.5 52	1, 0 9	1, 0 3	1, 2 4	1, 2 0	4, 3 2

4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor al	102.744.500	78.400.000	102.451.000	136.998.820	65.721.400	97.461.120	76.369.605	92.033.400	50.289.070	29.825.000	102.744.400	78.399.900	102.450.900	136.998.720	65.721.300	1,05	1,03	1,11	2,72	2,20
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	25.666.000	20.472.500	35.042.500	25.500.000	6.551.000	22.876.100	19.922.250	31.741.000	12.133.700	3.550.600	25.665.900	20.472.400	35.042.400	25.499.900	6.550.900	1,12	1,03	1,10	2,10	1,85
JUMLAH :		6.954.525.994	6.360.090.070	6.343.032.186	7.109.009.158	7.819.212.043	6.374.031.428	5.869.960.875	5.739.480.489	6.121.093.665	3.434.598.305	1.390.905.098,80	1.272.017.914,00	1.268.606.337,20	1.421.801.731,60	1.563.842.308,58	1,09	1,06	1,11	1,71	4,09

2.2. IDENTITAS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencakup sumber daya aparatur, kondisi kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang saat ini diidentifikasi beberapa permasalahan bidang komunikasi dan informatika. Hasil identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan.

Hasil analisa terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan pengelolaan TIK

Dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Agam, seharusnya mendatangkan berbagai nilai tambah yang dapat membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun dalam kenyataannya TIK yang digunakan belum berjalan dengan baik yang di sebabkan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Rancangan Induk e-Government Kabupaten Agam sebagai mana mestinya dan perlu dilakukan evaluasi sesuai perkembangan
- b. Lemahnya komitmen untuk pelaksanaan TIK dalam menunjang Pemerintahan.
- c. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan TIK

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Kehumasan

Berkaitan dengan pengelolaan kehumasan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masih harus dilakukan pembenah-pembenahan untuk menunjang pelayanan informasi daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu ditindak lanjuti di antaranya:

- a. Lemahnya kerjasama dengan media massa
- b. Rendahnya pengelolaan terhadap insan pers

- c. Rendahnya kualitas pemberitaan
- d. Rendahnya publikasi potensi daerah dan pemerintahan

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Statistik

Berdasarkan Perpres Nomor 39..... bahwasanya sangat diperlukan data yang berkualitas dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Masih sangat kurangnya SDM yang bertugas mengelola statistik sektoral di Pemkab Agam.
- b. Rendahnya kesadaran OPD dan ASN dalam mengelola data.
- c. Lemahnya pola hubungan antara OPD dan Lembaga dalam Mengelola data.

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Belum memiliki aparatur ahli sandi ataupun fungsional persandian Masih rendahnya pemahaman terhadap emplementasi persandian.

5. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan profesional.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan melaksanakan dan pengembangan sebuah organisasi, tidak terkuai dengan pengembangan e-government. Ketersediaan SDM harus memadai, baik dari segi pengembang, pengelola maupun pengguna e-government. Terkait SDM untuk penerapan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Agam, memiliki beberapa persoalan antara lain:

- a. Terbatasnya SDM yang memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Terbatasnya PNS memiliki kemampuan dalam memanfaatkan TIK.
- c. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD.
- d. Terjadinya penempatan PNS yang memiliki pendidikan ilmu komputer atau yang sejenis, tidak ditugaskan di Dinas Komunikasi Dan Informasi.

“Dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan dan kesiapan SDM di bidang teknologi informasi lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya.” PNS yang mempunyai kemampuan TIK di beberapa kantor OPD Kabupaten Agam yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, hanya sebagian kecil orang saja, dan beberapa diantaranya belum tentu berlatar belakang pendidikan di bidang Informatika.

6. Kurangnya Sarana dan Prasarana TIK

Penerapan *e-government* tanpa infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi baik itu telekomunikasi, internet (ISP) maupun intranet (LAN) yang memadai akan memperlambat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis elektronik. Belum semua wilayah di Kabupaten Agam mendapatkan infrastruktur jaringan yang memadai. Infrastruktur jaringan di Kabupaten Agam sudah mulai dibangun sejak tahun 2003, namun untuk ketersediaannya sampai saat ini masih belum mencukupi.

a. Penempatan sistem komputer dan berbagai perangkatnya belum terintegrasi.

Sistem komputer dan perangkatnya merupakan infrastruktur penting dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Namun kondisi saat ini, sistem komputer yang dibangun di berbagai OPD dengan tingkat kualitas dan keamanan yang beragam menciptakan suatu sistem yang sulit untuk terintegrasi. Sistem dan aplikasi yang dibangun berjalan sendiri-sendiri tidak saling terintegrasi, akhirnya penggunaan anggaran pun tidak efisien.

b. Belum tersedianya Ruang Data Center.

Ruang data center merupakan sebuah sistem penyimpanan data yang menjamin eksistensi data di dalamnya. Pembangunan data center harus memenuhi standar tertentu untuk menjamin data yang tersimpan aman dan dapat diakses, seperti adanya HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning), sistem kelistrikan, akses kontrol dan

pengamanan, sistem raised floor, sistem kabinet server dan sistem kabel.

- c. Masih adanya beberapa wilayah yang belum mendapat layanan internet.

Perkembangan teknologi informasi seperti akses internet merupakan sebuah sarana komunikasi dan informasi antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya melalui media elektronik. Dalam hal penerapan e-government, maka akses internet merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kebutuhan pemerintah daerah dengan masyarakat.

- d. Belum memadainya akses telekomunikasi dan internet di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Palupuh, Palembang, Malalak dan IV Nagari.

Sebagaimana kebutuhan ketersediaan akses telekomunikasi dan internet bagi masyarakat, maka komunikasi dan internet sebagai salah satu jenis layanan masyarakat yang berada di kecamatan, dalam penerapan e-government tidak terlepas dari kebutuhan telekomunikasi dan akses internet.

- e. Masih banyaknya kantor pelayanan pemerintah belum memiliki akses internet.

Sebagaimana kebutuhan ketersediaan telekomunikasi dan akses internet bagi masyarakat, maka kantor-kantor pelayanan pemerintah seperti kantor camat, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), kantor wali nagari, sekolah yang mana sebagai tempat pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan, dalam penerapan e-government tidak terlepas dari kebutuhan telekomunikasi dan akses internet.

- f. Kecepatan akses jaringan internal antar kantor OPD sudah tidak memadai.

Jaringan intranet yang digunakan menghubungkan antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah menggunakan perpaduan antara kabel dengan teknologi UTP dan Radio dengan teknologi wireless. Namun karena sudah mulai banyaknya aplikasi sistem informasi dan pengguna yang memanfaatkan jaringan intranet ini, maka kapasitas atau kecepatan transfer data melalui kabel UTP dan koneksi wifi

sudah kurang memadai. Sehingga saat loading menggunakan aplikasi akan terasa lambat.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Agam

Visi Bupati dan Wakil Bupati Agam sebagai visi Pemerintah Kabupaten Agam 2025-2029 sebagai berikut:

“AGAM MADANI YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”

Untuk menunjang visi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam berperan pada misi dua yaitu:

“Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”

Telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Agam, sebagai berikut:

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Pemerintah Kabupaten Agam yang telah berjalan sejak tahun 2003, harus dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Dalam penyelenggaraannya perlu didukung oleh komponen-komponen strategis.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Agenda membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan prioritas Pelaksanaan **Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan Melalui Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi**. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keterlibatan stakeholder yang ada di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi pada berbagai pihak untuk menjadikan TIK sebagai agen dalam percepatan pembangunan daerah. Beberapa hal yang perlu dilakukan di bidang TIK antara lain:

- a. Melakukan pemasangan dan pembenahan infrastruktur untuk mendukung jaringan TIK.

- b. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- c. Melakukan pemeliharaan jaringan TIK di seluruh OPD atau stakeholder.
- d. Melakukan pendidikan dan pelatihan TIK bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
- e. Melakukan pendidikan TIK pada masyarakat di Kabupaten Agam khususnya melalui sekolah-sekolah.

Hasil dari identifikasi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika masih ada hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dalam rangkai pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

- a. Masih adanya beberapa wilayah yang belum ada akses internet dan telekomunikasi.

Kabupaten Agam mempunyai luas wilayah seluas 2.232,30 km². Untuk mengimplementasikan Smart Regency sangat membutuhkan akses internet dan telekomunikasi yang tersedia secara luas. Sehingga nantinya seluruh perangkat daerah dapat memberikan layanan publik secara online dan begitu juga masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota dapat mengakses layanan pemerintahan secara online melalui aplikasi-aplikasi yang ada.

- b. Masih kurangnya wadah penyaluran penyebaran dan pendayagunaan informasi di kalangan masyarakat.

Warga masyarakat di kecamatan masih dihadapkan pada permasalahan dasar untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Atas dasar itu masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga berdaya dan dapat hidup layak serta mampu mengatasi permasalahan di masa yang akan datang, antara lain faktor persaingan yang semakin terbuka baik di dalam maupun di luar negeri. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan

mendorong kelompok masyarakat untuk mendayagunakan informasi agar menjadi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Pemberdayaan diharapkan terjadi melalui proses peningkatan kesadaran akan pentingnya penyebaran informasi, peningkatan akses dan pendayagunaan informasi tersebut melalui kelompok. Sumber informasi yang relevan berada langsung di masyarakat. Adanya wadah penyaluran informasi akan berdampak pada kemandirian warga masyarakat.

c. Belum ada masterplan e-Government

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk menjamin penyelenggaraan e-government Kabupaten Agam dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya (interoperabilitas), maka diperlukan adanya perencanaan jangka panjang (master plan) yang mengatur tentang infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur system aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, dan kelembagaan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

d. Belum ada standar pengelolaan TIK.

Standar Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan untuk memberikan acuan atau tata cara pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Prosedur ini dipakai untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) OPD yang meliputi antara lain Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan perangkat TIK. Mengelola data informasi OPD, Admin IT OPD, Mengelola sub domain website/aplikasi online OPD, Melayani permohonan informasi publik, Penyelesaian pelayanan pengaduan publik dan sebagainya.

e. Belum adanya regulasi/kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kominfo.

Regulasi/kebijakan di bidang kominfo merupakan bagian dari pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten Agam berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- f. Belum tersedianya ruang data center yang memadai.

Data Center adalah sebuah tempat, bangunan, atau gedung yang berfungsi untuk menyimpan dan mengoperasikan server. Aplikasi pelayanan pemerintah daerah yang berbasis internet merupakan kepentingan yang sangat krusial karena dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pemerintah daerah. Banyak faktor yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar untuk dimanfaatkan dalam berbagai fungsi dan keperluan. Berbagai aplikasi yang telah ada memerlukan server yang terhubung pada data center sebagai tempat penyimpanan server dan hosting web server. Data center digunakan sebagai pengamanan server karena berfungsi untuk melindungi data-data maupun segala jenis informasi dari berbagai server hosting yang ada.

- g. Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional di bidang TIK.

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Agam masih belum mampu bersaing dengan daerah yang sudah maju lainnya. Karena tenaga-tenaga terampil di bidang TIK butuh disediakan sebanyak mungkin.

- h. Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan.

Berbagai aplikasi yang sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam memiliki banyak variasi baik platform maupun database yang dipakai. Hal tersebut akan menemui kendala yang cukup besar dalam menyajikan data yang melibatkan data dari beberapa database yang berdiri sendiri. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan proses integrasi data yaitu proses pengkombinasian dua atau lebih database agar mempermudah dalam berbagi dan analisis.

- i. Belum adanya gedung kantor yang representatif
Sejak diberlakukannya struktur baru, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam bertempat di Gedung eks Dinas Lingkungan Hidup di sebelah pasar Padang Baru Lubuk Basung. Gedung kantor yang ditempatkan saat ini dirasakan oleh pegawai Dinas Kominfo tidak nyaman untuk bekerja karena kondisi kantor yang tidak memadai.
- j. Fasilitas kerja yang belum memadai seperti perangkat elektronik, mobile dan kendaraan operasional.
Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD baru dibentuk pada Januari 2017, dengan demikian segala sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaan masih sangat minim atau belum lengkap.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya Regulasi Pemerintah Pusat di bidang Kominfo, persandian dan statistik.
- b. Ketersediaan dana pembangunan APBN/APBD/ Swadaya.
- c. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Aset yang ada.
- d. Optimalisasi pemanfaatan dana pembangunan APBN/APBD/ Swadaya yang ada.

Faktor Pendukung dan Pendorong sebagaimana dijelaskan di atas dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera					
No		Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		MISI II:			
1	-	Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.	Belum optimalnya fungsi kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Masih adanya beberapa wilayah yang belum ada akses internet telekomunikasi dan penyiaran	Adanya Regulasi Pemerintah Pusat di bidang Kominfo, Persandian dan statistik
		PROGRAM:			
	1	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Masih rendahnya pemanfaatan TIK dalam layanan pemerintahan dan public	dukungan anggaran dan masih rendahnya SDM yang memahami pengetahuan TIK	Perpres 95 tahun 2018 ttg SPBE serta penilaian indeks spbe
	2	Penunjang Urusan Pemerintah	Terbatasnya sarana dan prasarana kerja aparatur	Fasilitas kerja yang belum memadai seperti, perangkat elektronik, mobile dan kendaraan operasional	Optimalisasi pemanfaatan dan pembangunan APBN/APBD
	3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Masih rendahnya pemanfaatan data statistic sektoral dalam pelaksanaan Pembangunan	Belum tersedia Satu Data Sumatera Barat	Pada setiap OPD belum ada petugas khusus yang mempunyai Tusi sebagai pengumpul data statistic sektoral.
	4	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah (PID)	Rendahnya kemampuan pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat	Ketersediaan dana pembangunan APBN/APBD

5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Belum optimalnya penerapan system penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Belum memiliki aparaturnya ahli sandi ataupun fungsional persandian	Untuk kebutuhan pengamanan informasi pemerintah khususnya informasi elektronik
			Masih rendahnya pemahaman terhadap emplementasi persandian	

2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2017-2021, Terwujudnya Indonesia **Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong’. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Pada Renstra Kementerian Kominfo RI tahun 2021-2026, Sasaran Strategis Kemenkominfo RI sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintahan sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.

- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Pada Renstra Kementerian Kominfo RI, terdapat empat program kerja nasional berdasarkan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia, antara lain:

- a. Konektivitas Broadband Nasional (implementasi 4G dan konsolidasi operator telekomunikasi)
- b. Cyber Security & Governance, E-Government, E-Commerce.
- c. Digitalisasi Televisi.
- d. *Government Public Relation*

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 untuk ditelaah sebagai berikut :

- a. E- Government
- b. Keterbukaan Informasi Publik
- c. Pengamanan Informasi
- d. Statistik Sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam menyelaraskan dengan menargetkan pencapaian sasaran strategis nasional di tingkat kabupaten, yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta keterbukaan informasi publik.

Tabel 2.13

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas Broadband Nasional (implementasi 4G dan konsolidasi operator telekomunikasi) • Cyber Security & Governance, E-Government, E-Commerce. • Digitalisasi Televisi. • <i>Government Public Relation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pengelolaan informasi • Pengelolaan aplikasi informatika • Pengelolaan persandian untuk keamanan informasi • Penyelenggaraan statistik sektoral • Tata kelola organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses masyarakat masih terbatas terhadap informasi di beberapa kecamatan • Terbatasnya sarana dan prasarana TIK, telekomunikasi dan penyiaran • Terbatasnya SDM yang trampil dan profesional di bidang TIK, Kominfo, Persandian dan Statistik • Belum tersedianya Masterplan e-government Kab. Agam 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Regulasi Pemerintah Pusat di bidang Kominfo, persandian dan statistik • Ketersediaan dana pembangunan APBN/APBD/Swadaya • Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Aset yang ada. • Optimisme Kepala Daerah

2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk acuan dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan dalam Strategi Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yaitu:

Pemenuhan kebutuhan pelanggan telepon, terutama pelanggan rumah tangga. Kebutuhan sambungan telepon sampai tahun 2030 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan sambungan telepon untuk rumah tangga tahun 2030 adalah: ± 35.637 sambungan
2. Kebutuhan sambungan telepon untuk fasilitas sosial dan umum tahun 2030 adalah: ± 1.073 sambungan
3. Kebutuhan sambungan telepon umum tahun 2030 adalah: ± 360 sambungan
 - Optimalisasi Sentral Telepon Otomatis (STO) yang telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan teknologi kabel optik.
 - Meningkatkan pelayanan dengan mempermudah dalam pemasangan sambungan baru untuk jaringan telepon.
 - Di Kabupaten Agam terdapat 121 buah BTS (*Based Transceiver Station*) yang tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan untuk jangka menengah, seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi Kabupaten Agam akan mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *wireless* seperti penggunaan telepon genggam, serta internet, *Voice Over Internet Protocol (VOIP)*/multimedia. Oleh karena itu arahan pengembangan telekomunikasi di tahun perencanaan 2030 diupayakan selalu mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi diantaranya teknologi *wireless* seperti *Code Division Multiple Acces (CDMA)* dan *Global System for Mobile (GSM)* yang ada sekarang ini sehingga di masa mendatang jaringan telekomunikasi *wireless* (CDMA dan GSM) ataupun sejenisnya diharapkan

dapat menjangkau keseluruhan wilayah di Kabupaten Agam dengan biaya yang terjangkau. Arah penggunaan teknologi tersebut, diupayakan dapat melayani wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau, diantaranya: Kecamatan Malalak, Palembayan, Palupuh, Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Matur.

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	Kebutuhan sambungan telpon rumah tangga tahun 2030 diperkirakan sebanyak \pm 35.657 sambungan, fasilitas sosial \pm 1073 dan telpon umum sebanyak \pm 360 sambungan	1. Belum adanya BTS (Based Transceiver Station) di 4 kecamatan 2. Masih terbatasnya sambungan telepon Otomatis di beberapa Kecamatan	1. Pengembangan system jaringan diupayakan selalu mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi 2. Sentral Telepon Otomatis (STO) telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan kabel optic 3. Jumlah BTS yang ada saat ini sebanyak 121 BTS tersebar di beberapa kecamatan 4. Pengembangan system jaringan diupayakan selalu mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi

2.2.6 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan OPD

Program Kabupaten yang diturunkan menjadi program OPD dalam Renstra OPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Agam 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda.

Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu isu isu pembangunan berkelanjutan pada dokumen KLHS yakni perkembangan warnet yang tidak terkendali menyebabkan berbagai penyakit masyarakat dan ini telah ditindaklanjuti ke dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja jumlah pembinaan dan pengawasan dan pengendalian warung telekomunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan program-program ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.15
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan warung internet (warnet) yang tidak terkendali	belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap dampak kegiatan warnet dan antisipasi dan penanggulangan masalah <i>cybercrime</i>	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha warnet untuk mematuhi aturan pengelolaan dan perizinan usaha warnet	Peraturan Bupati Agam Nomor 11 tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Warnet

2.2.7 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis yaitu:

1. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Era globalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kedalam isu strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang dan waktu. TIK berkembang sangat cepat dan hampir seluruh aspek kehidupan telah menggunakan TIK. Keberadaan TIK membuat aktifitas yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan dan hiburan terakait erat dengan pemanfaatan TIK. Menyusun dokumen elektronik, melalukan perhitungan, menganalisa data dan sebagainya baik di masyarakat maupun organisasi pemerintahan sekalipun.

2. Layanan telekomunikasi dan internet

Kedudukan telekomunikasi dan internet telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah. Semuanya sudah hampir mengenal internet dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan, baik elemen pemerintah daerah (government), masyarakat (consumer/citizens) dan kalangan bisnis (business). Ketersediaan layanan ini akan memperlancar hubungan dan transaksi elektronik diantara elemen tersebut yaitu hubungan C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, G2C. Hampir semua transaksi yang terjadi saat ini telah menggunakan internet, seperti transaksi perbankan dan transaksi-transaksi lainnya.

3. Pengaturan menara telekomunikasi

Untuk memenangkan persaingan, para operator telekomunikasi akan selalu berusaha meningkatkan layanannya, maka keberadaan menara BTS menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas coverage area bagi para pengguna jasa telekomunikasi.

Dalam hal menara telekomunikasi lebih terkait dengan aspek prasarana yang dibangun dan merupakan kewenangan pengaturannya ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang mengatur tata ruang daerahnya kemudian membuat pengaturan menara telekomunikasi bersama di daerahnya masing-masing. Pengaturannya tidak hanya bertujuan agar tata kota menjadi lebih estetik dan harmonis dengan tata ruang dan wilayah di sekitarnya. Dari segi bisnis, menara telekomunikasi bersama juga dapat mendorong efisiensi dan menjadi sumber pendapatan daerah.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta berkaitan dengan kepentingan publik merupakan informasi publik terbuka. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 64

(1). Dengan diterbitkannya undang-undang keterbukaan Informasi Publik berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebagai lembaga publik harus mengedepankan hak setiap masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi yang berasal dari setiap organisasi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dengan seluas-luasnya selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Akses terhadap informasi publik tersebut dapat diperoleh baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang ada saat ini.

5. Statistik Sektoral

Statistik sektoral merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi saat ini, untuk pelaksanaan urusan statistik sektoral di Kabupaten Agam belum terakomodir dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelum ini pelaksanaan urusan statistik sektoral dilaksanakan oleh Bappeda. SOTK Bappeda pun saat ini tidak mengakomodir pelaksanaan urusan statistik sektoral.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu segera dilakukan analisis dan revisi kelembagaan perangkat daerah yang ada agar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik dapat dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditetapkan agenda utama yang merupakan pengelompokan secara garis besar dari prioritas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Tabel 2.16 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	ISU KLHS yang Relevan Dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan jaringan dan teknologi informasi	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan TIK	Dinas Kominfo tidak terlibat secara langsung dalam isu strategis dalam KLHS tetapi mendukung penyelesaian isu strategis tersebut melalui ketugasan dari Dinas Kominfo	Implementasi sebuah sistem identitas digital yang digunakan untuk berbagai transaksi pemerintahan	Percepatan digitalisasi untuk Indonesia terintegrasi pemerintahan digital kini telah bertransformasi menjadi <i>smart governance</i> , yang menekankan pada penggunaan teknologi canggih seperti AI, Big Data, dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan experience dan kepuasan masyarakat yang lebih baik	Program Smart city guna mewujudkan Kab. Agam sebagai daerah cerdas yang inovatif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City di Pemerintah Kab. Agam
SDM Teknologi informasi yang tersedia	Pengetahuan dasar pegawai tentang TIK belum merata					
Hasil Pembangunan TIK yang telah dilaksanakan dapat menjadi modal pembangunan	Anggaran pembangunan TIK masih rendah karena masih adanya asumsi bahwa pembangunan bidang teknologi informasi tidak secara langsung memberikan kontribusi pada peningkatan PAD					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah melalui penguatan sistem komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang informasi dan teknologi, Dinas Kominfo berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika berpegangan pada Visi RPJPD Kabupaten Agam yakni "Agam Madani, Maju dan Berkelanjutan" serta Visi RPJMD yakni "Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera" serta menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

Melalui pengelolaan komunikasi publik yang efektif, Dinas Kominfo berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Informasi pembangunan, kebijakan, serta program daerah disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan melalui partisipasi berbasis teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta integrasi data daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta menyediakan basis data yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya menjadi penyedia layanan informasi, tetapi juga motor penggerak transformasi digital daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah digital yang terintegrasi		Indeks SPBE	2,66	2,76	2,86	2,96	3,06	3,16	
		Meningkatnya keterbukaan informasi	Indeks keterbukaan informasi publik	79,79	79,80	79,81	79,82	79,83	79,84	Indeks keterbukaan informasi publik Tahun 2024 = 79,78 (Cukup Informatif)
		Meningkatnya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Indeks domain kebijakan internal SPBE	2,61	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	capaian tahun 2024 2,6
		Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	74	75	76	77	78	Nilai SAKIP Tahun 2024 = 72,80 (Sangat Baik)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	85,86	85,88	86	86,20	86,50	Indeks Kepuasan masyarakat Tahun 2024 = 85,01
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,76	2,77	2,78	2,79	2,80	2,81	Capaian Tahun 2024 = 2,75
		Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	340	341	342	343	343	345	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi/ Nilai Optimal Indeks KAMI (918) x 100%

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan dasar dan kapasitas pembangunan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	Akselerasi pembangunan prioritas	Pembangunan terintegrasikan dan berkelanjutan	penyelesaian dan konsultasi

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-program indikatif guna mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (*outcome*) yang telah disepakati. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Strategi
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana e-Government 2. Meningkatkan kualitas SDM	1. Peningkatkan kualitas jaringan computer 2. Pengembangan layanan elektronik 3. Peningkatan kapasitas tenaga Pengelola TIK

	<p>pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>2. Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik</p>	<p>1. Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penyediaan data yang berkualitas</p> <p>2. Peningkatan desiminasi data</p> <p>3. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik</p>
		<p>Mengembangkan sistim keamanan informasi</p>	<p>1. Meningkatkan sarana dan prasarana</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM</p>
		<p>meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, pengelolaan keuangan dan layanan PD</p>	<p>1. peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan perangkat daerah</p> <p>3. Peningkatan kualitas administrasi umum</p>

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang terarah, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sub kegiatan ini disusun sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik untuk periode 2025-2029.

Pelaksanaan sub kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat daerah, baik dalam aspek urusan komunikasi dan informatika serta persandian maupun statistika. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, diharapkan setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam dilaksanakan di wilayah ibukota Kabupaten Agam, kecamatan dan nagari. Sedangkan pendanaan dari seluruh program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kabupaten Agam dan APBN serta partisipasi dan swadaya masyarakat.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah digital yang terintegrasi				Indeks SPBE		
		Meningkatnya keterbukaan informasi			Indeks keterbukaan informasi publik		Indeks keterbukaan informasi publik Tahun 2024 = 79,78 (Cukup Informatif)
			Meningkatnya penyebaran Informasi pada masyarakat melalui media informasi		Persentase masyarakat yang terpapar informasi mengenai program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase kepuasan = (Jumlah responden yang menyatakan puas/total responden) X 100
				Terselenggaranya penyebaran informasi melalui media	Persentase media informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah media yang aktif digunakan pemkab Agam/ jumlah media informasi yang tersedia x 100%
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.	Relasi Media	Laporan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
					terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Komunikasi
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	Permohonan
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rekomendasi
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Media

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	Konten
		Meningkatnya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi			Indeks domain kebijakan internal SPBE		capaian tahun 2024 sebesar 2,6
					Indeks domain tatakelola SPBE		1,8
					Indeks domain manajemen SPBE		1,45
					Indeks Domain layanan SPBE		3,37
			Meningkatnya ketersediaan akses internet pada perangkat daerah		1. Persentase perangkat daerah yang terhubung akses internet yang disediakan (indikator dipilih) 2. Persentase Layanan digital Pemerintah yang terintegrasi (indikator dipilih)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	(agar memasukkan rumus atau definisi operasional untuk menentukan indikator)
				Terselenggaranya akses internet berkualitas pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/ Kota	
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Dokumen
				Terlaksananya Pembangunan dan/atau	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai	Aplikasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
				Pengembangan aplikasi khusus SPBE	dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Dokumen
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah (OPD)
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Perangkat Daerah (OPD)
		Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Tahun 2024 = 72,80 (Sangat Baik)
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2024 = 85,01
			Meningkatnya tatakelola		Persentase pemenuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
			administrasi dan operasional untuk kinerja perangkat daerah		kebutuhan operasional kantor dan ASN	Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya pengelolaan keuangan perangkat daerah secara tertib dan akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan
				Terselenggaranya layanan administrasi umum yang tertib dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Penyediaan komponen instalasi	Paket

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	listrik/penerangan bangunan kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
				Tersedianya barang milik daerah yang menunjang kinerja pemerintah daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Unit
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
				Terpenuhinya jasa penunjang yang mendukung kinerja	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
				perangkat daerah	penunjang pemerintahan daerah		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, tagihan listrik, tagihan telpon
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan orang (THL)
				Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi optimal	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral			Indeks Pembangunan Statistik		Capaian Tahun 2024 = 2,75
			Terwujudnya data statistik yang berkualitas dan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik.		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Terpenuhinya kebutuhan data statistik sektoral Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan data	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya kebutuhan data statistik sektoral Perangkat Daerah pada SIPD RI
				Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Dokumen
		Meningkatnya keamanan informasi			Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah		Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi/ Nilai Optimal Indeks KAMI (918) x 100%
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi		Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	capaian tahun 2024 = 338

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	KET.
			lingkungan pemerintah daerah				
				Terselenggaranya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan layanan keamanan informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Catatan :

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTC OME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Ta rg et	Pagu	Ta rg et	Pagu	Ta rg et	Pagu	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	100%	82	1.528.492.189	85	1.827.234.170	86	1.828.841.215	87	1.830.448.260	88	1.831.763.116	Persentase kepuasan = (Jumlah responden yang menyatakan puas/total responden) X 100% *mohon diganti karena tidak tepat
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase media informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah		100	1.682.394.081	100	1.850.633.489,10	100	2.035.696.838,01	100	2.239.266.521,81	100	2.463.193.173,99	Jumlah media yang aktif digunakan pemkab Agam/ jumlah media informasi yang tersedia x 100%
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan	Media	45		45		50		50		50		Media

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	relasi media													
Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	17	99.927.560,00	17	109.920.316,00	17	120.912.347,60	17	133.003.582,36	17	146.303.940,60	Komunitas	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	3	14.480.000,00	4	15.928.000,00	4	17.520.800,00	5	19.272.880,00	5	21.200.168,00	Permohonan	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	20	5.680.800,00	20	6.248.880,00	20	6.873.768,00	20	7.561.144,80	20	8.317.259,28	Rekomendasi	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	45	1.582.105.721,00	45	1.740.316.293,10	50	1.914.347.922,41	50	2.105.782.714,65	50	2.316.360.986,12	Media	
Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten		50	0	50	0	50	0	50	0	50	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terhubung akses internet yang disediakan	25	59,09	2.723.232.931	27,29	4.394.905.517	29,58	4.398.770.820	31,87	4.402.636.122	34,16	4.405.798.643	(agar memasukkan rumus atau definisi operasional untuk menentukan indikator)
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE	%	100	2.870.690.247,00	100	3.157.759.271,70	100	3.473.535.198,87	100	3.820.888.718,76	100	4.202.977.590,63	%
Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1	1.109.316.534,00	1	1.220.248.187,40	1	1.342.273.006,14	1	1.476.500.306,75	1	1.624.150.337,43	Dokumen
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	5	700.000.000,00	5	770.000.000,00	5	847.000.000,00	5	931.700.000,00	5	1.024.870.000,00	Aplikasi
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dokumen	1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1	48.400.000,00	1	53.240.000,00	1	58.564.000,00	Dokumen
Penyelenggaraan	Jumlah perangkat	PD	44	310.373.713,00	44	341.411.084,30	44	375.552.192,73	44	413.107.412,00	44	454.418.153,20	PD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ OUTCOME/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PD	20	711.000.000,00	20	782.100.000,00	20	860.310.000,00	20	946.341.000,00	20	1.040.975.100	PD	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100	4.684.313.729	100	4.778.000.004	100	4.782.202.237	100	4.786.404.470	100	4.789.842.660	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%	100	4.390.553.295,84	100	4.829.608.625,42	100	5.312.569.487,97	100	5.843.826.436,76	100	6.428.209.080,44	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	37	3.725.355.995,84	37	3.911.623.795,63	37	4.302.786.175,20	37	4.733.064.792,71	37	5.206.371.271,99	Org/Bln	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	53.110.000,00	12	58.421.000,00	12	64.263.100,00	12	70.689.410,00	12	77.758.351,00	Laporan	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100%	100	396.865.767,00	100	436.552.343,70	100	480.207.578,07	100	528.228.335,88	100	581.051.169,46	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.993.675,00	1	5.493.042,50	1	6.042.346,75	1	6.646.581,43	1	7.311.239,57	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	37.472.932,00	4	41.220.225,20	4	45.342.247,72	4	49.876.472,49	4	54.864.119,74	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	19.999.960,00	2	21.999.956,00	2	24.199.951,60	2	26.619.946,76	2	29.281.941,44	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	334.399.200,00	12	367.839.120,00	12	404.623.032,00	12	445.085.335,20	12	489.593.868,72	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100%	100	118.940.935,00	100	130.835.028,50	100	143.918.531,35	100	158.310.384,49	100	174.141.422,93	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	11.261.100,00	1	12.387.210,00	1	13.625.931,00	1	14.988.524,10	1	16.487.376,51	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	91.679.835,00	3	100.847.818,50	3	110.932.600,35	3	122.025.860,39	3	134.228.446,42	Unit

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	16.000.000,00	1	17.600.000,00	1	19.360.000,00	1	21.296.000,00	1	23.425.600,00	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100%	100	316.665.082,00	100	348.331.590,20	100	383.164.749,22	100	421.481.224,14	100	463.629.346,56	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tagihan	36	55.999.082,00	36	61.598.990,20	36	67.758.889,22	36	74.534.778,14	36	81.988.255,96	Tagihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	260.666.000,00	6	286.732.600,00	6	315.405.860,00	6	346.946.446,00	6	381.641.090,60	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100	142.772.000,00	100	157.049.200,00	100	172.754.120,00	100	190.029.532,00	100	209.032.485,20	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	115.500.000,00	3	127.050.000,00	3	139.755.000,00	3	153.730.500,00	3	169.103.550,00	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	16.980.000,00	20	18.678.000,00	20	20.545.800,00	20	22.600.380,00	20	24.860.418,00	Unit

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu		
Mesin Lainnya	yang Dipelihara													
Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.292.000,00	1	11.321.200,00	1	12.453.320,00	1	13.698.652,00	1	15.068.517,20	Unit	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	150	82	123.463.000	84	450.000.000	86	450.395.773	88	450.791.546	90	451.115.361		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan data	%	72	137.000.000,00	74	150.700.000,00	76	165.770.000,00	78	182.347.000,00	80	200.581.700,00	%	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	3	137.000.000,00	3	150.700.000,00	3	165.770.000,00	3	182.347.000,00	3	200.581.700,00	Dokumen	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Indeks KAMI	125	340	6.931.000	341	220.000.000	342	220.193.489	343	220.386.978	344	220.545.287	Indeks KAMI	
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan layanan keamanan informasi	%	100	20.000.000,00	100	22.000.000,00	100	24.200.000,00	100	26.620.000,00	100	29.282.000,00	%	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	Laporan	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1	29.282.000,00	Laporan	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTC OME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Ta rg et	Pagu	Ta rg et	Pagu	Ta rg et	Pagu	
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik												

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	KET.
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebaran informasi pada masyarakat melalui media informasi		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	
			Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya ketersediaan akses internet pada perangkat daerah		
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/ Kota	
			Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	KET.
1	2	3	4	5
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektifitas kinerja perangkat daerah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	KET.
1	2	3	4	5
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya data statistik yang berkualitas dan bermanfaat untuk		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	KET.
1	2	3	4	5
		perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik.		
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

IKU	Satuan	Target						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2.66	2.76	2.86	2.96	3.06	3.16	
Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	79.79	79.80	79.81	79.82	79.83	79.84	
Indeks domain kebijakan internal SPBE	Nilai	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	
Indeks domain tatakelola SPBE	Nilai	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	
Indeks domain manajemen SPBE	Nilai	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	
Indeks Domain layanan SPBE	Nilai	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	
Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	
Indeks KAMI (terkait Keamanan)	Nilai	340	341	342	343	344	345	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	74	75	76	77	78	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.50	85.86	85.88	86	86.20	86.50	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	IKK	SATUAN	TARGET					KETERANGAN	SATUAN
			2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PD	20	20	20	20	20	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$	PD
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Provinsi}} \times 100\%$	%
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	5	5	5	5	5	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,77	2,78	2,79	2,80	2,81	5 Domain: Prinsip	DATA

NO	IKK	SATUAN	TARGET					KETERANGAN	SATUAN
			2026	2027	2028	2029	2030		
								Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnin Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.	
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI (918)}} \times 100\%$	
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70	70	70	70	70	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	%
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	%	100	100	100	100	100	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	%

NO	IKK	SATUAN	TARGET					KETERANGAN	SATUAN
			2026	2027	2028	2029	2030		
								program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	
								Jumlah Penduduk x 100%	
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OP) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	82	84	86	88	90	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%
								jumlah OPD x 100%	
9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OP) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	82	84	86	88	90	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
								jumlah Jumlah	

NO	IKK	SATUAN	TARGET					KETERANGAN	SATUAN
			2026	2027	2028	2029	2030		
								OPD x 100%	
10	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	KAMI	340	341	342	343	344	Jumlah nilai per area keamanan informasi <hr/> jumlah area penilaian x 100%	

BAB V

PENUTUP

Dalam mewujudkan visi, misi, nilai-nilai luhur dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika dengan hasil terbaik. Komitmen tersebut dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam organisasi, sehingga komitmen ini tidak sekedar janji yang dituangkan dalam tulisan dan kemudian ditinggalkan. Tapi janji dan niat yang sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya dimiliki. Sehingga pada akhirnya tercapai apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika secara menyeluruh.

Dengan telah dirumuskannya Renstra ini, Dinas Komunikasi dan Informatika bersiap diri menghadapi masa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam proses manajemen, kegiatan-kegiatan ini akan dinilai untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini akan menjadi dasar penyusunan dan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran langsung RPJMD Kabupaten Agam, Renstra juga disusun untuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis. Jika pada saatnya lingkungan berubah, maka Renstra inipun akan menyesuaikan terhadap perubahan yang ada.

Niat baik dan seluhur apapun akan sia-sia, jika tidak diwujudkan dalam perbuatan. Oleh karenanya saya mengajak seluruh warga Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengerahkan segenap daya upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis ini. Sehingga akhirnya apa yang menjadi cita-cita atau visi kita dapat terwujud.